

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP POTENSI KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DWI SHINTA MAHESARANI
NIM. 12030111130192

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Shinta Mahesarani

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130192

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP POTENSI
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**

Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt

Semarang, 8 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt.)

NIP. 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dwi Shinta Mahesarani

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130192

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP POTENSI KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Juni 2015

Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt. (.....)
2. Dr. H. Jaka Isgiyarta, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Dwi Shinta Mahesarani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Dwi Shinta Mahesarani)

NIM 12030111130192

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the the effect of corporate governance on financial statement fraud. The variables of the corporate governance that is used are proportion independent Board of Commisioners (IND), managerial ownership (OSHIP), amount of audit committee meeting (MEET) and quality of external auditor (AUD) as moderating variable between amount of audit committee meeting (MEET) to financial statement fraud.

Agency theory explain it the distance between the principal and agent have different interests, then there are agency conflict have a negative impact such as fraud for personal gain. The population of this study was nonfinancial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008 to 2012. Total sample was 38 companies, consisting of 19 companies which did financial statement fraud, and 31 companies that are not financial statements fraud as matched. Data analysis was performed with the descriptive analysis, multikolonieritas testing and hypothesis testing using the logistic regression method.

The results of this study indicate that the amount of audit committee meeting (MEET) influence the financial statement fraud. Meanwhile, the proportion independent Board of Commisioners (IND), managerial ownership (OSHIP) and interaction quality of external auditor (AUD) with amount of audit committee meeting (MEET) has no significant impact on financial statement fraud.

Keywords: financial statement fraud, board of commisioners, managerial ownership, audit committee meeting and external auditor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Variabel-variabel dari tata kelola perusahaan yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP), jumlah rapat komite audit (MEET) dan kualitas auditor eksternal (AUD) sebagai variabel moderasi antara pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.

Teori keagenan menjelaskan jika antara pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, maka timbul konflik keagenan yang memiliki dampak negatif yaitu melakukan tindakan curang untuk kepentingan pribadi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 - 2012. Total sampel penelitian ini adalah 38 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dan 19 perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan sebagai pembandingnya. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, uji multikolonieritas dan pengujian hipotesis dengan metode regresi logistik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit (MEET) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP) dan interaksi kualitas auditor eksternal (AUD) dengan rapat komite audit (MEET) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci: kecurangan laporan keuangan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, rapat komite audit dan auditor eksternal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Berkat rahmat, anugerah, ilmu dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1).
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Anis Chariri, SE., Mcom., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran, nasihat, teguran, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Wali.

5. Bapak Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. dan Andrian Budi Prasetyo, SE, M.Si, Akt. yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menjawab pertanyaan penulis yang berkaitan dengan topik skripsi.
6. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Tri Heru Budi Santoso, S.IP. dan Ibu Sri Surtini, S.Sos., terima kasih untuk semua ketulusan dan keikhlasan atas cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, perhatian, kesabaran, dukungan, nasihat dan motivasi baik moril maupun materiil yang tidak terhingga dan tidak pernah berhenti. Semoga penulis selalu mampu memberikan yang terbaik dan menjadi anak yang saleh dan berbakti untuk kedua orang tua.
8. Kakakku Graysa Maulana, S.Pd., adikku Rania Dhiyarasi Shantini, beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penulis.
9. Muhammad Aritama Juniarto, S.E. terima kasih atas kebaikan, kasih sayang, perhatian, kesabaran, kenangan manis, kesediaan mendampingi, tempat berbagi suka dan duka, motivasi dan dukungan dalam memberikan bantuan dan doa, serta menjadi penyemangat untuk penulis.
10. Sahabatku tersayang Amanda Yogaputri dan Eral Veda Azhari, terima kasih selalu setia dan menjadi sahabat terbaik dalam keadaan apapun.
11. Warga Kos Nirwanasari Cluster kav 3: Dea, Fofu, Greena, Uti, Melisa, Anggi, Valen, Mba Syarmi, Mas Jono dan Fatih yang menjadi keluarga siap siaga selama di Semarang.

12. Kawan “*Konco*” (Fani, Firda, Sheilla, Yaya, Bekun, Satria, Andika, Kosyi, Satria, Melvin, Novrizal dan Faisal) dan Reza Auliya terima kasih atas pertemanan posesif, kesediaan saling menolong, canda tawa dan perjalanan unik serta menyenangkan yang telah dilewati. Sampai bertemu kembali dan segera sukses untuk kita. *I love you all*.
13. Kezia, Erika, July, Esther, Ana, Ipung, Pitri, Andri, Annisa IU, Afri, Danand Desspa, Akmal, Airlangga, Yulika dan kawan akuntansi “Gembel”, terima kasih atas pengalaman bermain, belajar, jalan-jalan bersama serta bersedia menjadi tim hore, tim penyemangat dan pendukung.
14. Om Yohan dan Isma, terima kasih atas informasi, saran, bantuan dan diskusi mengenai topik skripsi ini.
15. Teman-teman di kantor Bunda yang telah memotivasi dan membantu selama masa perkuliahan hingga lulus baik secara moril maupun materiil.
16. Teman seperjuangan, berbagi informasi dan saling mendukung Satrio, Candra, Rhety, Fika, Maya, Naris dan Fafa.
17. Teman-teman Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mewarnai kehidupan kuliah, mendukung dan berjuang bersama bahu-membahu untuk menyelesaikan studi.
18. Mas Ketut, Mas Tito, Mas Ryan, Mas Firza, Mba Akita, Mba Shanty, Mba Indri, Mba Icha, Mas Annas, Mas Adam, Mba Putri, Umar, Brian, Adit, Rizky, Rizky TP, Putri dan Pandu, terima kasih atas kerja sama dan pelajaran berharga selama di organisasi.

19. Warga “*Batan’s Community*”: Anti, Cahya, Puti, Dila, Feby, Isi, Iqri, Indah dan Tanita. Terima kasih telah menjadi teman bermain, diskusi, belajar bersama dan motivasi prestasi.
20. Kawan “*Social*”: Febi, Manda, Finta, Annisa, Dewi, Fitri, Glady, Kirty, Latul, Lulu, Olive, Sarah dan Uzhy.
21. Kawan KKN Tim II Desa Bandungrejo, Kabupaten Jepara: Neysa, Fitria, Mba Tika, Rony, Hamid, Awa, Desy, Bima dan Bona.
22. Semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu baik secara moril dan materiil selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun mudah-mudahan dapat menjadi satu sumbangan yang berarti bagi pembaca dan yang membutuhkan. Besar harapan penulis untuk adanya saran dan kritik perbaikan di masa mendatang.

Semarang, 1 Juni 2015

Penulis,

Dwi Shinta Mahesarani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta"

-Albert Einstein

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan"

-(Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6)

"Bersabar adalah tetap memelihara kebaikan diri sampai datangnya jawaban doa"

-Mario Teguh

Kupersembahkan:

Teruntuk Ayah dan Bunda yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan kasih sayang

Untuk Kakak dan Adiknya tercinta

Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukungnya

Orang tercinta dan teman-teman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.1.2 Tata Kelola Perusahaan.....	14

2.1.1.2.1 Tujuan Tata Kelola Perusahaan	15
2.1.1.2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan	16
2.1.1.2.3 Dewan Komisaris	18
2.1.1.2.4 Kepemilikan Manajerial	21
2.1.1.2.5 Rapat Komite Audit	22
2.1.1.2.6 Kualitas Auditor Eksternal	24
2.1.1.3 <i>Konsep Fraud</i>	25
2.1.1.3.1 <i>Financial Statement Fraud</i>	27
2.1.1.4 <i>Fraud Tree</i>	28
2.1.1.5 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	35
2.3 Perumusan Hipotesis	36
2.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	36
2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	38
2.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	38
2.3.4 Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.1.1 Variabel Dependen	42

3.1.2 Variabel Independen	43
3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	43
3.1.2.2 Kepemilikan Manajerial.....	44
3.1.2.3 Jumlah Rapat Komite Audit.....	45
3.1.3 Variabel Moderasi.....	45
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	47
3.5 Metode Analisis	48
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Regresi Logistik	49
3.5.3 Uji Multikolinearitas	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Sampel	54
4.1.2.1 Sampel Berdasarkan Jenis Industri	55
4.1.2.2 Sampel Berdasarkan Tahun.....	56
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Statistik Deskriptif	57
4.2.2 Analisis Statistik Multikolinearitas dan Regresi Logistik	62
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas.....	62
4.2.2.2 <i>Goodness of fit test</i>	63
4.2.2.3 <i>Omnibus test (Overall test)</i>	64
4.2.2.4 Koefisien Determinasi	66

4.2.2.5 Tabel Klasifikasi 2 X 2	66
4.2.2.6 Model Regresi Logistik	67
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	68
4.2.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	69
4.2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	69
4.2.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	69
4.2.3.4 Pengaruh Interaksi Rapat Komite audit dengan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	70
4.3 Pembahasan Hasil	70
4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	71
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	73
4.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	74
4.3.4 Pengaruh Interaksi Kualitas Auditor Eksternal dengan Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	75
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Implikasi.....	79

5.3 Keterbatasan.....	79
5.4 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Sampel Berdasarkan Jenis Industri	54
Tabel 4.2 Sampel Berdasarkan Jenis Industri	55
Tabel 4.3 Sampel Berdasarkan Tahun	56
Tabel 4.4 Perincian Sampel.....	58
Tabel 4.5 Deskripsi Kategori Perusahaan <i>Fraud</i>	58
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Komisaris Independen	59
Tabel 4.7 Deskripsi variabel Kepemilikan manajerial	60
Tabel 4.8 Deskripsi variabel Komite Audit	60
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel KAP berdasarkan <i>fraud</i>	61
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.11 <i>Hosmer Lameshow Test</i>	64
Tabel 4.12 Perubahan Nilai -2 LL.....	65
Tabel 4.13 <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	65
Tabel 4.14 Nilai R ²	66
Tabel 4.15 Tabel Klasifikasi 2X2	66
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Logistik	68
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fraud Tree</i>	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Hasil Statistika	86
Lampiran B Surat Izin penelitian	95
Lampiran C Peraturan Nomor VIII.G.7	96
Lampiran D Lembar Penutup Peraturan Nomor VIII.G.7	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Berdasarkan SAK (2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Menurut *Financial Accounting Standar Board (FASB)* pemakai utama laporan keuangan adalah pemegang saham, investor lain, dan kreditor (Hendriksen, 2000.)

Laporan keuangan tidak hanya menyajikan mengenai besarnya laba atau rugi, tetapi mencakup posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Informasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan para *stakeholder* dalam membuat keputusan. Misalnya, informasi dalam laporan keuangan tersebut digunakan investor untuk membuat keputusan dalam melakukan penjualan atau pembelian saham, mengukur tingkat pengembalian dividen yang akan diterima dan kinerja perusahaan.

Laporan keuangan seharusnya memuat informasi yang valid dan relevan serta terbebas dari adanya kecurangan. Tetapi, berdasarkan fakta yang bersumber dari laporan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemberitaan media massa, terdapat beberapa perusahaan publik yang terkena sanksi oleh OJK karena pelanggaran terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan misalnya, PT

Energi Mega Persada Tbk dan PT Bakrie and Brothers Tbk yang terlibat kasus pada tahun 2010.

Setiap perusahaan pada dasarnya menghendaki laporan keuangan yang diterbitkannya menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan terbaik atau menguntungkan. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan tindak kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan yang dapat menyesatkan *stakeholder*. Laporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan menimbulkan turunnya integritas informasi keuangan dan menjadi sumber informasi yang tidak valid untuk digunakan sebagai dasar analisis dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, karyawan, auditor dan kompetitor (Ansar, 2011).

Kecurangan adalah tindakan kekeliruan atau penipuan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Ernst & Young LLP, 2009). Kecurangan atas laporan keuangan termasuk dalam tindakan *fraud* dan dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) (Salman dalam Ansar, 2011).

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan menarik diteliti. Tindakan *fraud* telah menimbulkan beberapa kasus skandal akuntansi dalam dunia bisnis global, antara lain Enron, Merck dan World Com (Hidayah, n.d). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Kimia Farma dan PT. Broadband Multimedia Tbk yang melibatkan manipulasi laporan keuangan (Bapepam, 2002). Kasus demikian mengindikasikan bukti kuat adanya kegagalan audit yang berdampak

kerugian kepada pelaku bisnis. Tidak semua kasus salah saji terkait dengan kecurangan, tetapi telah terbukti adanya faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen.

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) mengungkapkan bahwa kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat menimbulkan konsekuensi yang tidak baik terhadap investor dan eksekutif (Moeller, 2009). Berdasarkan pada laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan di Amerika Serikat mengakibatkan kerugian sekitar 6% dari pendapatan atau \$600 milyar pada tahun 2002 (Koroy, 2008).

Di Indonesia, kasus kecurangan pelaporan keuangan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain sanksi yang diberikan kepada PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI). Keempat emiten terbukti melakukan *fraud* melalui manipulasi laporan penyajian penggunaan dana hasil penawaran umum (Raharjo, 2010).

Contoh lainnya adalah kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada tahun 2002 ditemukan salah penyajian dalam laporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 (Bapepam, 2002). PT KF melebihiajikan penjualan dan

persediaan 3 unit usaha, meningkatkan harga persediaan serta melakukan pencatatan ganda atas penjualan 2 unit usaha. (Baepam, 2002).

Kecurangan laporan keuangan telah dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Dechow (dikutip oleh Skousen *et al.*, 2009) insiden kecurangan tertinggi yaitu pada perusahaan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Kecenderungan melakukan tindakan *fraud* lebih besar terjadi pada perusahaan dengan latar belakang yang didominasi oleh pihak dalam (*insider*) dan berkemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow *et al.* dalam Skousen *et al.*, 2009).

Meningkatnya berbagai kasus akuntansi di dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Skousen *et al.*, 2008). Tindakan *fraud* dimungkinkan muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan (Meutia, 2004). Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Ritonga, 2014).

Praktik dalam yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*) (Jackson, 2009). Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang

berkepentingan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). Chen *et al.* (2006) menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Kualitas tata kelola perusahaan dapat diukur dengan menggunakan struktur dewan komisaris, komite audit independen dan konsentrasi kepemilikan (Klapper dan Love, 2002). Hal tersebut menunjukkan pengawasan dan kepentingan individu sebagai pemegang saham mempengaruhi terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris berperan sebagai pengawas manajemen dalam mengelola perusahaan. Secara umum dewan komisaris memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen termasuk dalam menyajikan laporan keuangan (Chtourou *et al.*, 2001).

Komite audit merupakan bagian dari pengawas dalam perusahaan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, memberi pendapat independen dan profesional mengenai laporan yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009).

Auditor memegang peranan penting dalam mendeteksi tindakan *fraud*, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor eksternal bertugas memberikan opini terhadap kewajaran, konsistensi dan kesesuaian terhadap standar akuntansi Indonesia. Auditor eksternal terbentuk atas usulan komite audit dan dibentuk dalam RUPS. Auditor dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya *fraud* dengan memberi informasi kepada perusahaan melalui komite audit (jika ada) tentang

setiap kejadian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum (Komite Nasional Kebijakan *Governance*/KNKG, 2006). Hal tersebut dapat memperkuat aktifitas rapat komite audit dalam melakukan pengawasan.

Kepemilikan manajerial merupakan ukuran dari adanya pemegang saham dalam pihak manajemen dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham orang dalam memiliki motivasi yang lebih besar untuk memantau manajemen. Biaya yang terkait dengan pemantauan manajemen lebih kecil dari manfaat yang diharapkan melalui kepemilikan manajerial di perusahaan (Rahnamay dan Nabavi, 2010).

Berdasarkan penelitian Chtourou *et al.* (2001) dan Rahnamay dan Nabavi (2010) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan praktik tata kelola perusahaan dalam mengawasi manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Murhadi (2009) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara keberadaan komisaris independen dengan *fraud*.

Jackson *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Artinya, semakin tinggi persentase anggota independen maka semakin kecil *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian Beasley (1996) yang menunjukkan keberadaan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud*. Hal tersebut menunjukkan keberadaan komite audit belum mampu mengurangi *fraud* yang terjadi di perusahaan.

Becker *et al.* (1998) membuktikan bahwa tuntutan terhadap praktik manajemen laba diantaranya dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik

(KAP) yang berkaitan. Ukuran KAP berpengaruh untuk menghasilkan kualitas auditor yang lebih baik (Meutia, 2004). Sedangkan, penelitian Nuryaman dan Rusmin (2010) menemukan kualitas auditor eksternal dengan ukuran spesialisasi audit perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Gagola pada tahun 2011 mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan (Ansar, 2011). Penelitian lainnya dilakukan oleh Chen *et al.* (2006) menyatakan bahwa struktur kepemilikan memiliki sedikit dampak terhadap *fraud*. Berbeda dengan Nuryaman *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *fraud*.

Hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya mendorong penelitian ini dilakukan. Hal tersebut menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2006) yang menghubungkan variabel-variabel proksi tata kelola perusahaan dengan *fraud*. Variabel proksi tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan jumlah rapat komite audit terhadap *financial statement fraud* serta kualitas auditor eksternal sebagai moderasi hubungan antara jumlah rapat komite audit terhadap *financial statement fraud*. Penelitian ini mengacu pada jurnal Chen *et al.* (2006) dalam konteks menguji variabel-variabel proksi tata kelola perusahaan terhadap indikasi kecurangan. Perbedaan antara penelitian Chen *et al.*

(2006) dengan penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel jumlah rapat komite audit sebagai variabel independen.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa kasus kecurangan laporan keuangan telah terjadi akhir-akhir ini. Kecurangan atas laporan keuangan tidak memunculkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut menimbulkan kesalahan persepsi oleh pengguna laporan keuangan yang berdampak kerugian bagi para pelaku bisnis.

Kecurangan atas laporan keuangan terjadi karena adanya tata kelola perusahaan yang lemah. Sistem kontrol audit oleh auditor eksternal dan pengawasan yang lemah telah dihubungkan dengan kecurangan laporan keuangan pada beberapa penelitian yang telah ada. Kegagalan auditor dalam memprediksi kasus kecurangan menimbulkan dampak yang luas bagi para pemangku kepentingan bisnis.

Pengawasan dan struktur kepemilikan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan hasil kinerja perusahaan. Menurut Effendi (2009) tata kelola perusahaan yang baik dapat membentuk pola kerja manajemen yang transparan dan profesional. Sistem tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang bersih dan transparan.

Hasil penelitian yang tidak konsisten dalam hubungan tata kelola perusahaan dengan kecurangan laporan keuangan mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan yaitu: proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat komite audit serta

interaksi kualitas auditor eksternal dengan rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah jumlah rapat komite audit mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah interaksi kualitas auditor eksternal dengan jumlah rapat komite audit mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Pengaruh interaksi kualitas auditor eksternal dengan jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi keperilakuan. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam meminimalisir dan mencegah tindakan *fraud* untuk menghindari penyimpangan dalam studi teori keagenan.

2. Aspek Praktis

Meningkatkan nilai tambah struktur organisasi pengendalian dalam sistem pengendalian manajemen serta membentuk sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk menghindari terjadinya *fraud* pada perusahaan dalam rangka mempraktikkan *corporate governance* yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dibahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga membahas hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu kemudian dibuat kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penjelasan tersebut meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis variabel proksi tata kelola perusahaan terhadap variabel kecurangan laporan keuangan. Semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis diuraikan dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *fraud* atau *earnings management* tidak terlepas dari teori keagenan (*agency theory*) (Salno dan Baridwan, 2000). Konsep keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam memahami tata kelola perusahaan. *Agency theory* merupakan hubungan atau kontrak antara *principal* (pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*), dengan *agent* (pihak yang menjalankan kepentingan *principal*) (Scott, 1997). Adanya pemisahan status antara pemilik dan pihak manajemen perusahaan menimbulkan *agency problem* antara pemilik dengan pengelola perusahaan.

Menurut Messier *et al.* (2006), hubungan keagenan menimbulkan dua permasalahan, yaitu : (1) Terjadinya informasi asimetris, yaitu manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sesungguhnya dan posisi operasi entitas dari pemilik, (2) Terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Manajemen sebagai pihak agen seharusnya membantu pemilik sebagai pihak prinsipal untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi, adanya keinginan untuk memenuhi kepentingan sendiri memungkinkan pihak manajemen melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, seperti penggelapan aset perusahaan dalam jangka waktu panjang, manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang.

Agency problem menimbulkan adanya *agency cost*, yaitu biaya pengawasan oleh *principal*, biaya perikatan oleh *agent* dan kerugian residual (Jensen dan Meckling, 1976). *Residual loss* merupakan pengurangan kekayaan yang dimiliki pihak *principal*. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keputusan yang dipilih pihak *agent* dan keputusan yang memaksimalkan kekayaan *principal*.

Hubungan keagenan berkaitan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengawasan dalam struktur perusahaan. Perilaku pihak manajemen yang mengutamakan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan lain dapat terjadi ketika manajer memiliki informasi lengkap mengenai perusahaan dan pemilik tidak memiliki informasi tersebut (*asymmetric information*) (Ujiyanto dalam Arifin, 2010).

Asymmetric information memungkinkan terciptanya keputusan-keputusan yang kurang optimal untuk perusahaan. Kondisi demikian menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang baik karena tidak adanya keterbukaan informasi (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya ketidakjelasan informasi yang dihasilkan manajemen akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*), mendorong tindakan merugikan seperti *fraud* atau *manipulation earning* dalam pelaporan keuangan. Tindakan tersebut akibat adanya *conflict of interest* dan *asymmetric information* dengan pemilik. Rezaee (2002) menyatakan bahwa tindakan manajemen laba berkaitan erat dengan *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya *agency problem*

antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat memicu terjadinya *financial statement fraud* yang menyesatkan dan merugikan *stakeholder*.

Berdasarkan kondisi demikian, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan iklim pengelolaan perusahaan yang terbuka dan *accountable* agar dapat meminimalisir terjadinya *financial statement fraud*. Hal tersebut memungkinkan para *stakeholder* mengkaji dan menilai keefektifan keputusan yang dibuat manajer sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan pemangku kepentingan (Riyanto *et al.*, 2005).

2.1.1.2 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. Selain itu, tata kelola perusahaan juga meliputi pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang berfungsi sebagai pedoman pengevaluasian kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan (*The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*, 1999).

Menurut Effendi (2009) definisi tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dari

definisi diatas dapat disimpulkan tata kelola perusahaan adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengelola, mengatur dan mengawasi hubungan antara pihak pengelola perusahaan dengan *stakeholders* disuatu perusahaan. Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja tetapi juga dapat berperan sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Badan Pegelola Pasar Modal di banyak negara mengemukakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang sehat di perusahaan-perusahaan publik telah berhasil mencegah penyajian laporan keuangan yang tidak transparan (Siswanto dan Aldridge, 2005). Berdasarkan pernyataan tersebut tata kelola perusahaan yang baik memberi kontribusi dalam usaha pencegahan *financial statement fraud*.

2.1.1.2.1 Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Suprayitno *et al.* (2005), tujuan tata kelola perusahaan memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil merupakan tujuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)* dari Komite Kebijakan Nasional *Governance/KNKG* (2006) menyatakan tata kelola perusahaan diperlukan dalam rangka:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajiban,

- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing – masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan,
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya,
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.1.2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang bertugas membuat pedoman penerapan *GCG* di Indonesia. KNKG telah mengeluarkan pedoman prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- a. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Fairness*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

d. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

e. Independensi

Untuk melancarkan penerapan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.1.2.3 Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) secara umum dewan komisaris bertugas mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, menjamin pelaksanaan strategis perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Tugas komisaris juga termasuk pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan tumbuh berkembang. Pengawasan menjadi komponen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Chen *et al.*, 2006). Adanya pengawasan yang efektif dapat mengurangi *financial statement fraud* dalam rangka terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Beasley, 1996).

Keefektifan pengawasan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh independensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Akuntabilitas dewan komisaris menjadi salah satu prinsip *good corporate governance* (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD* dalam Herwidayatmo, 2000). Kerangka *corporate governance* telah mengatur pedoman strategis perusahaan dan pemantauan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Berdasarkan KNKG (2006) fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi.
- d. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- e. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka
- f. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.

Bursa Efek Indonesia mengatur rasio jumlah dan persyaratan komisaris independen. Hal ini diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek No 1-A Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di Bursa, dinyatakan bahwa :

- a. Jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komisaris.
- b. Komisaris independen dilarang memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya, dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi.
- c. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kriteria Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam yaitu:

- a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Tidak mempunyai saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

2.1.1.2.4 Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pihak dalam (*insider*) dan pemegang saham pihak luar (*outsider*). Pihak *insider* yaitu pemegang saham yang berada di jajaran direktur dan komisaris, sedangkan pada pihak *outsider* yaitu pihak institusi, individu dan lain-lain (Demsey *et al.*, 1993). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkat pengawasan pihak eksternal pada perusahaan (Hanafi, 2004).

Masalah tata kelola perusahaan timbul karena adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Kepemilikan saham oleh manajerial dipandang mengurangi masalah agensi tersebut (Jensen and Meckling, 1976). Dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan akan mempengaruhi kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan ini, para manajer akan lebih bersikap hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan lebih termotivasi dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal. Penelitian Skousen *et al.* (2009) menyatakan bahwa kecenderungan *fraud* dapat dilihat dari kepemilikan manajerial orang dalam.

2.1.1.2.5 Rapat Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sesuai dengan Kep. 29/PM/2004. Berdasarkan pedoman KNKG Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
2. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
3. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Prinsipnya tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.

Hal tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, yaitu memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan, komite audit memiliki aktivitas rapat audit yang erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan termasuk dalam hal pengendalian terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6 tanggal 7 Desember 2012, pedoman rapat komite audit sebagai berikut:

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.1.1.2.6 Kualitas Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertugas mengaudit untuk memberi pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Dalam proses tersebut auditor eksternal memiliki hubungan

kerja dengan komite audit dalam mengadakan pengawasan eksternal audit.

Berdasarkan pedoman KNKG tahun 2006 komite audit wajib :

1. Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau penggantian auditor eksternal,
2. Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal,
3. Meninjau biaya untuk eksternal audit,
4. Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal,
5. Meninjau laporan audit eksternal,
6. Meninjau *management letters* audit eksternal,
7. Memonitor kinerja auditor eksternal,
8. Memastikan, bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan dengan independensi.

Auditor eksternal merupakan salah satu mekanisme dalam mengendalikan perilaku manajemen sehingga proses pengauditan memiliki peranan penting sebagai bagian dari tata kelola perusahaan (Palestin, 2008). Berdasarkan pernyataan tersebut, kualitas akuntan publik menjadi bagian dari proses tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi terwujudnya hasil tata kelola perusahaan yang baik dan mencegah *fraud*. Komite audit merekomendasikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan dipilih sebagai auditor eksternal, kepada dewan komisaris. Kebijakan akhir penentuan KAP ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kualitas auditor eksternal dapat membantu aktivitas kinerja komite audit. dalam menindaklanjuti temuan hasil audit untuk mencegah atau mendeteksi *fraud*

yang terjadi. Dengan demikian, auditor eksternal dan komite audit secara bersama-sama dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kecurangan.

Kemampuan auditor eksternal mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dalam pendeteksian kecurangan. Pengalaman kompetensi profesional yang dimiliki auditor eksternal dalam menghadapi kasus *fraud* diperlukam untuk proses pendeteksian *fraud*. KAP yang profesional memiliki kualitas audit yang baik dalam pengendalian dan mendeteksi kecurangan. Kantor akuntan publik yang lebih besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Meutia, 2004). Chen *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa kualitas auditor eksternal dapat diukur melalui ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa perusahaan tersebut.

2.1.1.3 Konsep *Fraud*

Pengertian *fraud* dapat dilihat dari berbagai perspektif pada beberapa kategori kecurangan. *Fraud* merupakan (BPK, n.d.):

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Menurut BPK (n.d.) secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah:

1. harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
2. dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
3. fakta bersifat material (*material fact*);
4. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
5. dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
6. pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
7. yang merugikannya (*detriment*).

2.1.1.3.1 Financial Statement Fraud

American Institute Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan *financial statement fraud* adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan (*Moeller, 2009*). Menurut Elliot dan Ashton (1987) kecurangan laporan keuangan berfokus pada perusahaan publik yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan disengaja yang merugikan secara materil dan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak transparan dapat digunakan sebagai

pembenaran dalam memperoleh pinjaman, meningkatkan kompensasi bonus dan menjual saham.

Secara umum tindakan *fraud* dilakukan oleh manajemen puncak atas nama organisasi (Rezaee, 2002). Tindakan tersebut dilakukan oleh eksekutif perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Gravitt dalam Nguyen (2008) *financial statement fraud* terkait skema sebagai berikut:

1. pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang material, dokumen pendukung atau transaksi bisnis;
2. kelalaian yang disengaja atau misrepresentasi peristiwa, transaksi, rekening, atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun;
3. kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, pengakuan, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis;
4. kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan dan nilai keuangan yang terkait.

2.1.1.4 *Fraud Tree*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah organisasi profesional anti *fraud* sebagai penyedia utama pelatihan dan pendidikan anti *fraud* yang bertujuan memberantas *fraud* (ACFE, 2012). *ACFE* telah mengklasifikasi

kecurangan dalam bentuk *fraud tree* secara skematis. *Fraud tree* merupakan sistem klasifikasi berbagai bentuk kecurangan yang memiliki tiga cabang utama yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation* dan *Fraudulent Statements*.

1. *Corruption*

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang terkait dengan kerja sama atau kesepakatan. Korupsi pada *fraud tree* terdiri dari empat bentuk, yaitu benturan kepentingan pada pelaku bisnis, penyuapan, gratifikasi dan ancaman terhadap rekanan.

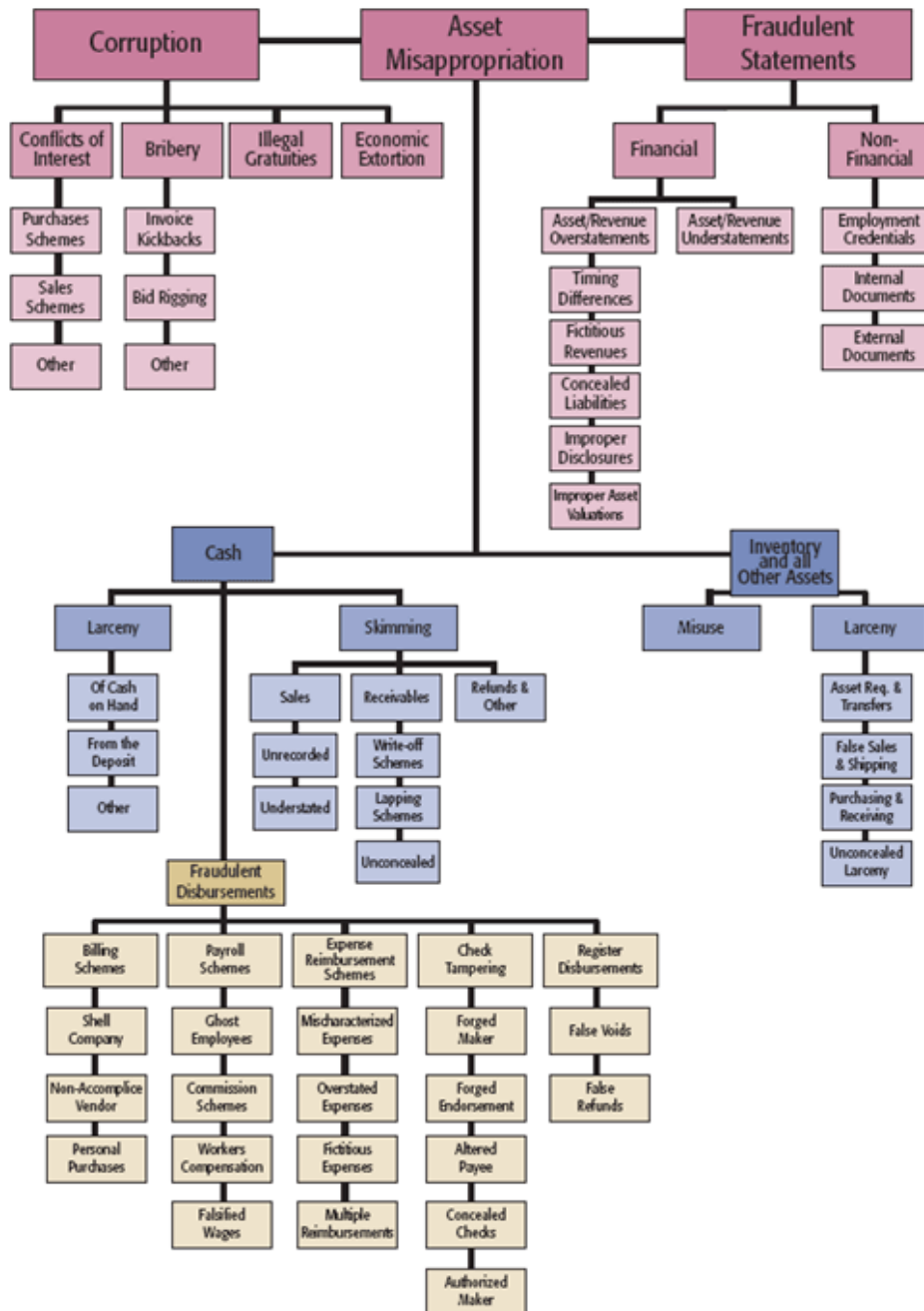
2. *Asset Misappropriation*

Asset misappropriation merupakan pengambilan aset secara illegal atau tidak sah dan melawan hukum. *Asset misappropriation* secara *cash* dapat

Gambar 2.1

Fraud Tree

Uniform Occupational Fraud Classification System



Sumber: *The Association of Certified Fraud Examiners 2002 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*

dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan cara mengambil uang sebelum masuk perusahaan, setelah masuk dalam ke perusahaan dan penggelapan aset.

3. *Fraudulent Statements*

Kecurangan pelaporan meliputi kecurangan penyusunan, penyajian laporan keuangan dan laporan non keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan berupa *overstatement* dan *understatement*. Sedangkan, kecurangan atas laporan non keuangan berupa manipulasi dan segala pemalsuan penyajian laporan non keuangan yang terdapat dalam dokumen untuk kepentingan *stakeholder*.

2.1.1.5 Penelitian Terdahulu

Beasley (1996) mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengawasan yang berdampak pada kecurangan pelaporan keuangan. Hasil identifikasi tersebut diuraikan dalam penelitiannya mengenai hubungan komite audit independen dengan kecurangan pelaporan keuangan. Beasley (1996) menganalisis hubungan antara proporsi anggota komite audit independen dan jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan. Hasilnya menunjukkan semakin besar proporsi anggota komite audit independen maka semakin kecil potensi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dan jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan.

Jackson *et al.* (2009) mengkaji hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kecurangan. Jackson *et al.* (2009) menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan proses kontrak terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil
----	----------	-------------------	----------	-------

1	Beasley (1996)	Menguji secara empiris hubungan antara pengawasan dengan kecurangan laporan keuangan	1. Independen: komite audit independen, jumlah rapat komite audit 2. Dependen: <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	1. Semakin besar proporsi anggota komite audit yang berasal dari luar <i>board of director</i> maka semakin kecil potensi kecurangan terjadi 2. Pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan
2	Chen et al. (2006)	Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan dan <i>boardroom characteristic</i> terhadap kecurangan keuangan	1. Independen: <i>boardroom characteristic, ownership structure</i> , kualitas auditor eksternal 2. Dependen: <i>Fraud</i>	1. <i>Boardroom characteristic</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> 2. <i>Ownership structure</i> memiliki sedikit dampak terhadap <i>fraud</i> 3. Kualitas auditor eksternal tidak mempengaruhi kecenderungan <i>fraud</i>
3	Antonia (2008)	Menganalisis Pengaruh Reputasi Auditor, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba	1. Variabel Independen : Reputasi auditor, Proporsi dewan komisaris independen, Leverage, Kepemilikan manajerial, Proporsi komite audit independen. 2. Variabel dependen : Manajemen Laba	1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba
No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil

4	Meutia (2002)	Meneliti pengaruh independensi auditor pada hubungannya antara kualitas audit dan manajemen laba	1. Independen: kualitas audit 2. Dependen: manajemen laba 3. Moderasi: <i>non-audit service</i> , masa jabatan auditor	1. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Keberadaan non audit service meningkatkan hubungan dengan manajemen laba
5	Owens Jackson <i>et al.</i> (2009)	Menganalisis asosiasi antara karakteristik komite audit dan kontrak proses terhadap kecurangan pelaporan keuangan	1. Independen: <i>Characteristic committee audit, size, leverage, managerial ownership</i> 2. Dependen: <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	1. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan, rapat komite audit, <i>size</i> dan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan
6	Halima Shatila Palestin (2006)	Menganalisis bukti empiris pengaruh praktik tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba	1. Independen: Struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran KAP, kompensasi bonus 2. Dependen: manajemen laba	1. Struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba 2. Komite audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3. Kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba
No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel	Hasil

7	Skousen <i>et al.</i> (2009)	Mengkaji secara empiris efektivitas teori Cressey (1953) mengenai kerangka faktor resiko kecurangan yang diterapkan dalam SAS No.99 untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan	1. Independen: <i>Financial stability, personal financial need and ineffective monitoring</i> 2. Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i>	1. Pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai dan pembiayaan eksternal yang secara positif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> . 2. Kepemilikan saham eksternal dan internal serta kontrol dewan direksi juga terkait dengan peningkatan <i>financial statement fraud</i> . 3. Ekspansi jumlah anggota independen di komite audit berhubungan negatif dengan terjadinya kecurangan.
---	------------------------------------	--	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai literatur.

Karakteristik komite audit diklasifikasikan berdasarkan komite audit yang memiliki keahlian dan jumlah rapat komite audit. Proses kontrak diprosikan melalui *leverage* dan kepemilikan manajerial. Hasil pengujiannya menunjukkan komite audit yang memiliki keahlian keuangan, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan, sedangkan tingkat *leverage* tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian Jackson *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa rasio keuangan tidak berhubungan dengan kecurangan. Tetapi, pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengawas dan pemilik perusahaan memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian lebih lanjut dilakukan Palestin (2006) dengan menganalisis hubungan *corporate governance* terhadap potensi *fraud* dengan proksi manajemen laba. Variabel struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, komite

audit dan ukuran KAP menjadi variabel proksi *corporate governance*. Hasilnya menunjukkan semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba kecuali komite audit dan ukuran KAP.

Chen *et al.* (2006) melakukan penelitian mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan *fraud* di China. Pada saat restrukturisasi industri di China, banyak terjadi privatisasi perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perubahan struktur organisasi dalam tata kelola perusahaan. Chen *et al.* (2006) mencoba menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan kasus kecurangan yang terjadi di China.

Chen *et al.* (2006) menggunakan variabel *boardroom characteristic*, *ownership structure* dan kualitas auditor eksternal sebagai proksi tata kelola perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap *fraud*.

Realitanya tata kelola perusahaan memiliki peran dalam kecurangan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan ditemukan bahwa tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan. Beberapa penelitian di atas telah membahas variabel proksi dari tata kelola perusahaan yang menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Penelitian mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan kecurangan atas laporan keuangan masih sedikit dilakukan di Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan pada laporan keuangan perusahaan menggunakan variabel proksi proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial.

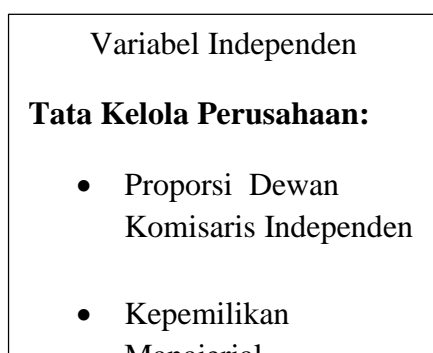
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

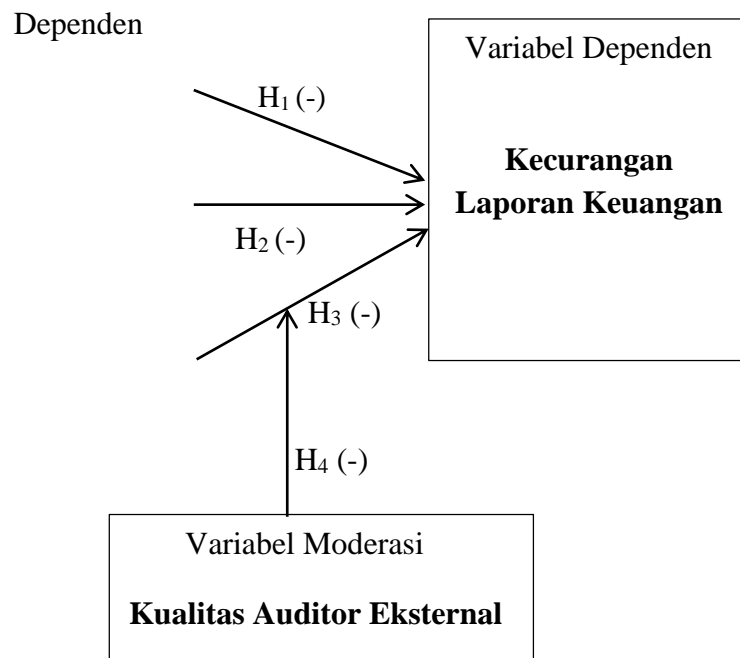
Laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang handal dan *reliable*. Akan tetapi, karena ada hal lain yang memungkinkan terjadinya penyajian laporan keuangan yang tidak transparan atau salah saji pada laporan keuangan. Salah saji pada laporan keuangan meliputi kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Tujuan penelitian ini untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka meminimalisir dan mencegah *financial statement fraud*. *Fraud* menandakan lemahnya pengendalian oleh manajemen perusahaan. Pengendalian perusahaan perlu ditingkatkan, baik pengendalian internal maupun pengendalian eksternal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Tindakan proaktif perlu dilakukan perusahaan untuk mengatasi potensi terjadinya kecurangan demi menjaga kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kualitas dari tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan, dengan kualitas auditor eksternal yang memoderasi pengaruh rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Kualitas dari tata kelola perusahaan (*the quality of corporate governance*) diukur dengan menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan rapat komite audit serta kualitas auditor eksternal sebagai moderasi rapat komite audit terhadap kecurangan (Chen, *et al.* 2006). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis





2.3 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis antara lain:

2.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hubungan agensi terjadi jika prinsipal mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh prinsipal. Terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan agen dapat menjadi masalah dalam hubungan agensi.

Asimetri informasi ini dapat menjadi celah terjadinya *fraud*. Untuk menghindari adanya praktik *fraud* dalam perusahaan, dibutuhkan unit pengawas yang mampu memonitoring jalannya perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *fraud*, dibutuhkan pihak lain yakni dewan komisaris independen. Dewan

komisaris dipercaya dan bertanggung jawab mengawasi operasi bisnis setiap harinya termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat manajemen (Chen *et al.*, 2006). Fungsi lain dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan laporan keuangan. Komisaris yang berasal dari luar tidak memiliki kepentingan terhadap pihak internal perusahaan, akan melakukan pengawasan lebih independen. Hal tersebut mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya *agency problem* dapat dicegah. Penelitian Dechow *et al.* (1996) menunjukkan bahwa kecurangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota dewan komisaris independen (Skousen *et al.*, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial dapat ditunjukkan dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam dianggap dapat

mengatasi permasalahan agensi, karena dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut penelitian Chen *et al.* (2006), semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki orang dalam, maka kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik adalah komite audit. Keberadaan komite audit adalah salah satu usaha menyejajarkan kepentingan perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Palestin, 2008).

Komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan. Hal tersebut membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, seperti celah untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok. Komite audit yang selalu melakukan rapat akan terus mengawasi proses pelaporan keuangan tersebut. Rapat yang akan semakin banyak, dipandang meminimalisir peluang kepada manajer untuk memanipulasi pelaporan keuangan.

Beasley *et al.* (1996) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kecurangan umumnya bertemu setahun sekali. Abbott *et al.* (2000) memaparkan bahwa kehadiran komite audit yang bertemu minimal dua kali setahun akan berhubungan dengan penurunan kemungkinan kecurangan.

Frekuensi rapat komite audit yang semakin banyak akan menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Jackson, 2009). Rapat-rapat komite audit menjadi sarana untuk memantau dan mengawasi proses pelaporan. Komunikasi yang terjalin pada rapat antara komite audit dengan auditor eksternal atau manajer atau auditor internal, meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Auditor menjadi salah satu mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajemen sehingga proses pengauditan memiliki peranan penting dalam

mengurangi biaya keagenan dan membatasi perilaku yang menguntungkan untuk pribadi atau manajemen sendiri (Palestin, 2008). Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik pada suatu perusahaan direkomendasikan oleh komite audit kepada dewan komisaris, kemudian ditentukan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham tentunya menghendaki KAP terbaik yang profesional agar dapat menganalisis hasil kinerja keuangan sesungguhnya yang dilakukan pihak agen. Namun di sisi lain, kualitas KAP dapat dipengaruhi oleh relasi hubungan auditor-auditee (Koroy, 2008). Hal tersebut dapat mempengaruhi sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Meutia (2004) kantor akuntan publik yang lebih besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Chen *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa kualitas auditor eksternal dapat diukur melalui ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa perusahaan tersebut.

Auditor memiliki peran penting dalam mencegah praktik penipuan di perusahaan, yaitu menghalangi penipuan tersebut dengan cara deteksi potensi terjadinya *fraud* akan dilaporkan dan dengan cara memaksa revisi atau penyajian kembali laporan keuangan (Chen *et al.*, 2006). Hal tersebut membantu efektivitas aktivitas rapat komite audit sebagai auditor internal dalam meminimalisir terjadinya kecurangan. Kualitas auditor eksternal dapat membantu aktivitas kinerja komite audit. dengan menindaklanjuti temuan hasil audit untuk mencegah atau mendeteksi *fraud* yang terjadi. Dengan demikian, auditor eksternal dan komite audit secara bersama-sama dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kecurangan.

Auditor eksternal dapat memperkuat pengaruh rapat komite audit dalam menurunkan probabilitas kecurangan.

Untuk mengukur kualitas auditor eksternal, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan audit sebagai proksi kualitas audit (De Angelo, 1981 dalam Chen *et al.*, 2006). Semakin tinggi kualitas auditor eksternal (yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Big 4), maka semakin kecil kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Hipotesis keempat yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Interaksi kualitas auditor eksternal dengan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis tata kelola perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Metode kuantitatif dipilih karena dalam penelitian ini bersinggungan dengan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy* yang dikategorikan menjadi dua, yaitu kode 1 (satu) untuk perusahaan-perusahaan *fraud* yang berdasarkan laporan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perusahaan yang telah terbukti melakukan kecurangan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik serta terkena peringatan dan atau sanksi dari OJK dan kode 0 (nol) untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (*non fraud*). Perusahaan yang dikategorikan melakukan kecurangan laporan keuangan berdasarkan laporan yang dikeluarkan pihak Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2008 – 2012, yaitu:

1. Perusahaan yang dikategorikan *fraud* adalah perusahaan yang terindikasi kecurangan pada laporan keuangan karena melanggar peraturan VIII.G.7 serta diberi peringatan dan atau sanksi.
2. Unsur kecurangan yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan adalah perusahaan yang melanggar peraturan VIII.G.7 pada lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Salah satu poin peraturan yang terdapat di dalam VIII.G.7 adalah tentang perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan kesalahan periode lalu.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau tidak terikat merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, yaitu proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan jumlah rapat komite audit. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel-variabel proksi dari tata kelola perusahaan.

3.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut ketentuan Peraturan Pencatatan Efek No 1-A Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen

secara proporsional harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Variabel ini (IND) diukur dengan menggunakan total komisaris independen dibagi total dewan komisaris.

$$IND = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{total dewan komisaris}}$$

3.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Skousen *et al.*, (2009) kontrol dalam pelaporan keuangan adalah dengan kepemilikan sebagian saham oleh orang dalam. Kecurangan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan saham. Saham merupakan bukti hak kepemilikan yang dimiliki *shareholder* atas perusahaan dan bukti adanya hak klaim atas aset perusahaan. Kebijakan manajerial dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Cara pengukuran kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) adalah menggunakan total kepemilikan saham orang dalam dibagi total saham beredar.

$$OSHIP = \frac{\text{Total kepemilikan saham orang dalam}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.1.2.3 Jumlah Rapat Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6 tanggal 7 Desember 2012 mengenai pedoman rapat komite audit adalah komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Variabel ini diukur dengan menggunakan total jumlah rapat komite audit (MEET).

$$\text{MEET} = \text{Total jumlah rapat komite audit}$$

3.1.3 Variabel Moderasi

Varibel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kualitas auditor eksternal. Kualitas auditor eksternal memoderasi antara hubungan jumlah rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel kualitas auditor eksternal pada penelitian ini diukur dengan 4 Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, yang diyakini mampu menemukan atau mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi secara optimal dan meningkatkan penilaian dalam hal kejujuran laporan keuangan (Chen *et al.*, 2006). Empat KAP besar terdiri dari *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), dan *Ernst and Young* (EY). Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor yang termasuk 4 KAP besar, dan 0 jika lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor nonperbankan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 - 2012. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan tidak dipilih karena regulasi penyajian laporan keuangan pada perusahaan perbankan berbeda dengan sektor nonperbankan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Perbedaan tersebut dapat mengurangi kevalidan hasil penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian adalah:

1. Perusahaan sampel adalah perusahaan yang bergerak di sektor nonperbankan dan yang terdaftar di BEI periode yaitu, 2008 - 2012.
2. Perusahaan yang dikategorikan *fraud* menggunakan data laporan dari pihak OJK, yaitu perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan VIII.G.7 Bapepam (sekarang OJK), serta terkena peringatan dan atau sanksi dan pelanggaran tersebut mengandung unsur *fraud*.
3. Perusahaan memiliki data lengkap mengenai profil dewan komisaris, komite audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan kepemilikan manajerial pada tahun 2008 - 2012.
4. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan *non fraud* adalah sebagai pembanding untuk perusahaan kategori *fraud* yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan Bapepam yang mengandung unsur *fraud* selama periode 2008 – 2012. Sampel diambil secara berpasangan antara kategori perusahaan yang melakukan *fraud* dengan perusahaan yang tidak

melakukan *fraud* yang didasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria pengambilan sampel perusahaan *non fraud* agar tidak terjadi ketimpangan data yaitu :

- a. Bergerak di bidang industri yang sama dan/atau sejenis dengan perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud*.
- b. Memiliki total aset yang mendekati atau hampir sama dengan perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan serta bertujuan menguji hipotesis untuk menjawab semua pertanyaan dari subyek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena lebih dipercaya keabsahannya dikarenakan laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik, penelitian sejenis sebelumnya menggunakan data sekunder, data mudah diperoleh dan tidak memerlukan banyak biaya dan waktu seperti penelitian kualitatif.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini seluruh data yang diperlukan diperoleh dengan metode dokumentasi, yaitu data-data yang digunakan terdapat dalam dokumen-dokumen yang telah ada, yaitu *annual report* tahun 2008 - 2012 yang dapat diakses

di situs resmi BEI (<http://www.idx.co.id>) serta laporan keuangan dan *annual report* perusahaan yang didapat dari Pojok BEI Undip dan website masing-masing perusahaan serta laporan yang dikeluarkan pihak OJK. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *nonrandom* karena penelitian menggunakan keseluruhan populasi penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran data variabel penelitian yaitu, variabel dependen berupa kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dan variabel independen berupa indikator-indikator dalam tata kelola perusahaan. Penggunaan analisis statistik deskriptif pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran ringkas dari sekumpulan data, memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka akan lebih mudah menyimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Selain itu, dapat ditentukan jenis pengolahan statistik lebih lanjut sesuai dengan karakteristik yang ada melalui ukuran-ukuran statistik deskriptif.

Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum. *Mean* digunakan untuk mengetahui besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi untuk mengetahui besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum dan minimum, untuk mengetahui jumlah terbesar dan terkecil data yang bersangkutan.

3.5.2 Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan untuk menguji probabilitas terjadinya variabel independen terhadap variabel dependen yang terdiri dari variabel campuran, yaitu kontinu (metrik) dan kategorial (nonmetrik). Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena penelitian ini melibatkan berbagai macam variabel prediktor baik numerik ataupun kategorik, termasuk variabel *dummy*. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu kode 1 untuk perusahaan curang dan 0 untuk perusahaan yang tidak curang. Menurut Ghozali (2006), regresi logistik digunakan karena variabel independen dapat dihandel secara mudah di mana pada analisis diskriminan penggunaan variabel *dummy* menimbulkan masalah dengan kesamaan *variance* atau *covariance*. Regresi logistik dipengaruhi lebih sedikit dibandingkan analisis diskriminan oleh ketidaksamaan *variance/covariance* dalam kelompok, sebuah asumsi dasar dari analisis diskriminan dan regresi logistik yang menghasilkan persamaan regresi berganda berkenaan interpretasi dan pengukuran diagnosis *casewise* yang tersedia untuk residual yang diuji.

Dalam penelitian ini model regresi logistik yang dilakukan terhadap model yang diuji menggunakan *software* SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Hubungan antara kecurangan pada laporan keuangan (*financial statement fraud*) dengan proksi-proksi dari kualitas tata kelola perusahaan (proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial) diuji menggunakan model:

$$\ln(p/1-p) = \alpha - \beta_1 \text{INDt} - \beta_2 \text{OSHIpt} - \beta_3 \text{MEETt} - \beta_4 \text{AUD} - \beta_5 \text{AUD. MEETt} + \epsilon$$

$\ln(p/1-p)$	= Kejadian kecurangan laporan keuangan
IND_t	= proporsi dewan komisaris independen
$OSHIP_t$	= proporsi kepemilikan manajerial
$MEET_t$	= jumlah rapat komite audit
AUD_t	= variabel <i>dummy</i> , kode 1 (satu) untuk auditor yang termasuk 4 KAP besar, kode 0 (nol) untuk yang lainnya
ϵ	= <i>error term</i>
α	= konstanta
β	= koefisien variabel

Menurut Ghozali (2006) langkah-langkah yang dikerjakan dalam regresi logistik adalah sebagai berikut:

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Goodness of fit test dapat dikerjakan dengan memperhatikan *output* dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit 52 test*. Hipotesis nol ditolak jika nilai statistic *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05, berdasarkan hal tersebut berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai observasi dengan model sehingga *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Hipotesis nol tidak dapat ditolak jika nilai *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 dan hal ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menilai *overall fit model* terhadap data dan untuk menilai hal ini dilakukan beberapa *test statistic*. Berikut ini adalah hipotesis untuk menilai model fit :

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Berdasarkan hipotesis ini jelas tidak akan menolak hipotesis nol agar model fit dengan data. *Likelihood* L merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Selain itu statistik $-2\text{Log}L$ dapat digunakan untuk menentukan apakah dapat memperbaiki model secara signifikan jika variabel independen ditambahkan ke dalam model. Penurunan *likelihood* ($-2\text{Log}L$) menunjukkan adanya model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskam *fit* dengan data.

3. Koefisien Determinasi (*Cox and Snell's R Square* dan *Nagelkerke's R Square*)

Cox dan Snell's R Square adalah ukuran yang mencoba meniru ukuran *R Square* pada *multiple regression*. *Cox dan Snell's R Square* sulit diinterpretasikan karena didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari satu. Koefisien determinasi dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression* dengan menggunakan *Nagelkerek R Square*. *Nagelkerek's R Square* adalah modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1.

Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R Square* dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2006). Nilai yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. Tabel Klasifikasi 2 x 2

Tabel klasifikasi 2 x 2 merupakan cara menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Pada tabel kolom terdiri dari dua nilai prediksi variabel dependen, yaitu melakukan kecurangan laporan keuangan (1) dan tidak melakukan kecurangan laporan keuangan (0), sedangkan pada tabel baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Apabila model sempurna, semua kasus akan berada pada posisi diagonal dengan tingkat peramalan 100%. Jika pada model logistik terjadi homoskedastisitas, maka persentase yang benar akan sama untuk kedua baris.

5. Pengujian Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa besar semua variabel independen yang terdapat pada model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. *P-value (probability value)* dapat digunakan untuk menentukan koefisien regresi logistik, yaitu membandingkan nilai p dengan α .

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.
- b. Signifikansi *p-value* dijadikan dasar untuk kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

didasarkan pada signifikansi $p\text{-value}$. Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika $p\text{-value} < \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.

3.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi (Ghozali, 2006). Dalam sebuah model regresi sebaiknya pada antar variabelnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Jika ditemukan antar variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi masing-masing variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi pada variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi korelasi yang cukup tinggi maka hal tersebut menjadi indikasi adanya multikolinearitas (umumnya diatas 0.9) .